


MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI PALU

Jl. Samratulangi Palu KOTA PALU

SULAWESI TENGAH

<http://pn-palu.go.id/>

PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 April 2025 sampai 30 Juni 2025

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
NILAI INDEKS
3,97 / 99,31%

Jumlah 36 RESPONDEN

Jenis Kelamin LAKI-LAKI : 13

PEREMPUAN : 23

Pendidikan Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0

SD : 1

Diploma 3 : 7

SMP : 0

S1 : 19

SMU : 7

S2 : 2

Diploma 1 : 0

S3 : 0

Pekerjaan PNS : 14

SWASTA : 7

TNI : 1

WIRAUSAHA : 0

POLRI : 2

TENAGA KONTRAK : 0

LAINNYA : 12

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	3,972
2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	3,972
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	3,972

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. 1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ?

- Pengadilan Negeri Palu telah melakukan publikasi terkait informasi biaya pelayanan di Pengadilan di website pengadilan, banner panjar biaya perkara di area PTSP yang mudah dijangkau oleh pengguna layanan. Selain itu, para pengguna layanan dapat bertanya secara langsung.

2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?

- Semua Pelayanan di Pengadilan Negeri Palu tidak dikenakan biaya dan untuk PNBP dapat langsung dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengadilan Negeri Palu selalu melakukan pelatihan petugas PTSP sehingga kedepannya semakin jadi petugas yang profesional dan menguasai bidang kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?

- Pengadilan Negeri Palu menegaskan bawah praktek menjual pengaruh di pengadilan dalam pemberian layanan publik dan penanganan perkara yang ada di pengadilan sudah tidak terjadi. Serta himbauan anti gratifikasi berdasarkan lampiran SEMA No. 17 Tahun 2019 yang terpampang nyata di ruangan PTSP dan disampaikan melalui sound dapat terdengar di setiap ruangan.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

29 Juli 2025

Ketua Pengadilan Negeri